

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : DEWAN PENGAWAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD KUSNAENI**
2. Jabatan : **ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**
3. NHK : **860052**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **170.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **11.000.000****D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **325.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.706.000.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.706.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.